

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan **April 2026**, Kota Banjarbaru mengalami inflasi dan deflasi.

- Minggu I (M1): IPH tercatat mengalami inflasi sebesar 1,63, dengan andil utama dari komoditas Daging Ayam Ras (0,842), Bawang Merah (0,5042), dan Cabai Merah (0,293).
- Minggu II (M2): IPH mengalami penurunan menjadi 0,53, dengan andil utama dari Bawang Merah (0,5042), Cabai Merah (0,293), dan Cabai Rawit (0,1185), serta pergerakan stabilisasi pada Daging Ayam Ras.
- Minggu III (M3): IPH kembali menurun tipis menjadi 0,21, masih dipengaruhi oleh andil Bawang Merah (0,5042), Cabai Merah (0,293), dan Cabai Rawit (0,1185), dengan Daging Ayam Ras sebagai komoditas pembanding.
- Minggu IV (M4): Kota Banjarbaru mulai berbalik arah mengalami deflasi dengan IPH menurun ke level -0,24, dipengaruhi oleh komoditas Daging Ayam Ras (0,6295), Telur Ayam Ras (-0,1486), dan Bawang Putih (-0,0766).
- Minggu V (M5): Deflasi di akhir bulan semakin mendalam dengan IPH menyentuh angka -0,51, didorong oleh penurunan harga Daging Ayam Ras (-0,8106), Telur Ayam Ras (-0,2218), dan Bawang Putih (-0,0766), dengan komoditas berpengaruh lainnya yaitu Cabai Merah.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Banjarbaru pada April 2026 menunjukkan tren penurunan yang sangat progresif dari level inflasi tinggi sebesar 1,63 pada minggu pertama hingga berbalik arah menjadi deflasi mendalam sebesar -0,51 pada minggu kelima.

Pergerakan dinamis ini dipicu oleh tingginya tekanan harga Daging Ayam Ras, Bawang Merah, dan kelompok cabai di paruh awal bulan, yang kemudian berhasil diredam secara efektif menjelang akhir bulan melalui peningkatan pasokan serta penurunan harga signifikan pada komoditas Daging Ayam Ras (andil -0,8106 di M5), Telur Ayam Ras, Bawang Putih, dan Cabai Merah. Secara keseluruhan, membaiknya dinamika pasokan barang pokok di pasar Kota Banjarbaru ini mencerminkan kondisi yang terkendali, namun tetap memerlukan pengawasan rutin serta langkah mitigasi berkala oleh TPID untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan daya beli masyarakat ke depan

Pada bulan **Mei 2026**, Kota Banjarbaru dominan mengalami deflasi sebagai berikut.

- Minggu I (M1): IPH tercatat mengalami deflasi sebesar -1,22, dengan andil utama dari komoditas Cabai Merah (-0,3553), Telur Ayam Ras (-0,3384), dan Bawang Merah (-0,3327), dengan Beras sebagai komoditas pembanding.
- Minggu II (M2): Deflasi semakin mendalam ke level -1,48, dipengaruhi oleh andil utama dari Daging Ayam Ras (-0,535), Bawang Merah (-0,3828), dan Cabai Merah (-0,3553), dengan komoditas berpengaruh lainnya yaitu Daging Ayam Ras.
- Minggu III (M3): Tren deflasi mencapai titik terdalam di level -1,62, dengan andil utama didorong oleh penurunan harga Daging Ayam Ras (-0,671), Bawang Merah (-0,4144), dan Telur Ayam Ras (-0,3384), dengan komoditas penyeimbang utama tetap pada Daging Ayam Ras.
- Minggu IV (M4): Pada minggu keempat, tidak dilakukan perhitungan IPH.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Banjarbaru pada Mei 2026 menunjukkan tren deflasi yang konsisten dan semakin mendalam, bergerak merosot dari level -1,22 pada minggu pertama hingga menyentuh titik terendah sebesar -1,62 pada minggu ketiga, sebelum akhirnya pemantauan ditutup karena tidak dilakukan perhitungan IPH pada minggu keempat. Kondisi deflasi signifikan ini dipicu oleh melimpahnya pasokan pangan dan penurunan harga masif pada komoditas utama, yang didominasi kuat oleh komoditas Daging Ayam Ras (andil deflasi terbesar -0,671 di minggu ketiga), Bawang Merah, Telur Ayam Ras, serta Cabai Merah. Secara keseluruhan, stabilitas harga pangan di pasar Kota Banjarbaru berada dalam kondisi yang sangat longgar dengan daya beli terjangkau, namun TPID tetap perlu melakukan pengawasan rutin untuk mengantisipasi potensi pembalikan harga (rebound) komoditas di masa mendatang.

Pada bulan **Juni 2026**, Kota Banjarbaru mengalami tren inflasi sebagai berikut.

- Minggu I (M1): IPH tercatat mengalami inflasi sebesar 1,92, dengan andil utama dari komoditas Bawang Merah (1,2357), Cabai Merah (0,6238), dan Beras (0,332), dengan Beras sebagai komoditas pembanding.
- Minggu II (M2): Inflasi meningkat tajam ke level 2,85, dipengaruhi oleh andil utama dari Bawang Merah (1,5944), Beras (0,6313), dan Cabai Merah (0,6238), dengan Bawang Putih sebagai komoditas pembanding.
- Minggu III (M3): IPH mengalami penurunan tipis menjadi 2,76, masih didominasi oleh andil Bawang Merah (1,3683), Beras (0,9565), dan Cabai Merah (0,5558), dengan Bawang Putih tetap sebagai komoditas pembanding.
- Minggu IV (M4): IPH kembali melandai ke level 2,60, dengan komoditas penekan utama beralih ke Beras (1,1636), Bawang Merah (1,1282), dan Cabai Merah (0,4986), serta Bawang Merah sebagai komoditas pembanding.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Banjarbaru pada Juni 2026 menunjukkan tekanan inflasi yang cukup tinggi di sepanjang bulan, di mana angka IPH melonjak dari 1,92 pada minggu pertama ke titik tertingginya sebesar 2,85 pada minggu kedua, sebelum akhirnya bergerak melandai secara gradual ke level 2,76 pada minggu ketiga dan ditutup pada level 2,60 di minggu keempat. Ketatnya pergerakan harga ini secara konsisten dipicu oleh tingginya andil komoditas pangan pokok, khususnya Bawang Merah (dengan andil tertinggi mencapai 1,5944 di M2), Beras yang terus merangkak naik hingga mencetak andil 1,1636 di akhir bulan, serta tekanan dari komoditas Cabai Merah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan pasokan pada komoditas pangan strategis tersebut, sehingga memerlukan pengawasan ketat, pemantauan rantai pasok, serta intervensi pasar yang cepat oleh TPID Kota Banjarbaru untuk mengendalikan harga ke depan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Banjarbaru Pada TRIWULAN II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Tekanan Inflasi Musiman Momentum HBKN Idul Adha 1447 H:** Adanya lonjakan permintaan masyarakat secara mendadak pada kelompok komoditas pangan pokok

(terutama beras, bawang-bawangan, gula pasir, dan ikan segar) serta bensin menjelang Hari Raya Idul Adha dan periode haji yang berpotensi memicu gejolak harga di pasar.

2. **Tingginya Volatilitas Harga Kelompok Pangan Bergejolak (*Volatile Food*):** Terjadinya fluktuasi harga yang tajam pada komoditas strategis seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang putih, dan minyak goreng. Pola ini terlihat dari fase deflasi yang sangat dalam di bulan Mei (-1,62%) yang kemudian berbalik menjadi tekanan inflasi kembali di bulan Juni.
3. **Risiko Dampak Musim Kemarau dan Cuaca Ekstrem:** Datangnya musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih awal serta ancaman risiko anomali cuaca yang berpotensi mengganggu produktivitas hasil tani (terutama komoditas padi/beras dan hortikultura) serta memicu kenaikan harga pakan ternak.
4. **Panjangnya Rantai Pasok Pangan Terdistribusi:** Masih panjangnya alur rantai distribusi pangan dari produsen hingga ke pedagang eceran di pasar Kota Banjarbaru, yang meningkatkan kerentanan terhadap biaya logistik dan risiko hambatan distribusi barang pokok.
5. **Ketergantungan Pasokan Daerah Luar dan Optimalisasi Lembaga Pangan:** Belum optimalnya penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memetakan wilayah surplus komoditas, serta masih perlunya penguatan peran BUMD pangan sebagai *offtaker* hasil pertanian lokal untuk mengamankan cadangan pangan mandiri jangka pendek.
6. **Perlunya Penguatan Infrastruktur Data dan Kapasitas Menuju 2028:** Kebutuhan krusial untuk meningkatkan kualitas pemantauan, validasi outlet komoditas, integrasi data, serta peningkatan kapasitas SDM terkait statistik harga sebagai langkah akselerasi persiapan Kota Banjarbaru menjadi Kota Penghitung Inflasi mandiri pada tahun 2028
7. **Kebutuhan Optimalisasi Sistem Peringatan Dini Komunikasi Publik: Masih perlunya penguatan sistem komunikasi publik berbasis *Early Warning System* (EWS) untuk mengelola ekspektasi masyarakat secara cepat dan tepat guna mencegah terjadinya kepanikan belanja (*panic buying*) saat terjadi fluktuasi harga**

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kota Banjarbaru pada TRIWULAN II tahun 2026 ini, TPID Kota Banjarbaru terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K, yaitu:

Keterjangkauan harga:

TPID Kota Banjarbaru menjaga keterjangkauan harga dengan mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan penyaluran Beras SPHP guna meredam lonjakan harga pangan strategis (Beras, Bawang Merah, dan Cabai) yang sempat menekan angka IPH di bulan April (1,63) dan Juni (2,85). Pemantauan harga dilakukan secara rutin dan intensif baik di pasar tradisional maupun ritel modern untuk memastikan harga tetap berada pada tingkat yang wajar dan menjaga daya beli masyarakat menjelang serta selama momentum HBKN Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui monitoring rutin stok komoditas di tingkat distributor guna memastikan ketahanan pangan aman dalam menghadapi periode HBKN dan musim haji. Menghadapi risiko musim kemarau dan anomali cuaca 2026 yang datang lebih awal, TPID melakukan langkah mitigasi berupa monitoring lahan pertanian rawan kekeringan, penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) di BULOG, serta mempersiapkan dukungan pompanisasi dan embung untuk menjaga kontinuitas produksi pangan lokal.

Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi dipastikan melalui sidak pasar secara terjadwal bersama instansi terkait untuk menjamin aliran barang pokok dari produsen/distributor berjalan lancar tanpa indikasi penimbunan. Selain itu, dilakukan optimalisasi program Jukung Pangan sebagai inovasi intervensi distribusi pangan, serta penguatan komitmen Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memfasilitasi kelancaran pasokan dari daerah surplus logistik ke wilayah Kota Banjarbaru.

Komunikasi Efektif

Strategi komunikasi efektif diimplementasikan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID pada 25 Mei 2026 bersama Bank Indonesia dan BPS guna memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mengantisipasi volatile food dan mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi panic buying. Selain itu, dalam rangka komunikasi jangka panjang, TPID secara aktif mendukung sosialisasi awal program persiapan Kota Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi Tahun 2028 melalui fasilitasi penguatan data Survei Biaya Hidup (SBH) 2027.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru pada TRIWULAN II Tahun 2026 secara umum berjalan cukup responsif, terutama dalam meredam volatilitas harga ekstrem kelompok pangan bergejol (volatile food). Pelaksanaan strategi 4K telah diimplementasikan melalui langkah konkret seperti pelaksanaan Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran beras SPHP secara intensif untuk menekan lonjakan IPH pada bulan April (1,63) dan melandaikannya kembali di akhir triwulan. Koordinasi lintas sektor yang diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) pada 24 Mei 2026 bersama Bank Indonesia dan BPS juga terbukti efektif dalam memetakan kesiapan komoditas pokok pangan strategis guna menghadapi momentum musiman Hari Raya Idul Adha 1447 H dan periode haji.

Namun, evaluasi menunjukkan adanya tantangan struktural baru yang memerlukan kewaspadaan ekstra, yaitu datangnya musim kemarau dan risiko anomali cuaca 2026 yang lebih awal. Hal ini secara langsung mengancam kontinuitas produktivitas pertanian lokal serta memicu lonjakan harga komoditas pasca-panen raya, seperti yang ditunjukkan oleh tingginya andil inflasi Beras (mencapai 1,1636) dan Bawang Merah pada minggu keempat Juni. Di sisi lain, meskipun fase deflasi yang sangat dalam pada bulan Mei (-1,62%) menguntungkan konsumen, kondisi penurunan harga yang terlampau tajam pada daging ayam ras dan cabai merah tetap memerlukan evaluasi agar tidak memukul keberlangsungan usaha peternak dan

petani lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pasar jangka pendek lewat program *Jukung Pangan* harus diimbangi dengan penguatan jangka panjang, seperti pompanisasi lahan, optimalisasi peran BUMD pangan sebagai *oftaker*, serta penguatan Kerja Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mengamankan surplus pasokan.

Secara keseluruhan, integrasi data IPH mingguan telah mendukung pengambilan kebijakan yang terukur. Langkah ke depan dalam persiapan Kota Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi Tahun 2028 menuntut peningkatan kualitas data statistik harga melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH) 2027. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pada triwulan berikutnya akan sangat bergantung pada penguatan infrastruktur logistik, mitigasi dampak kekeringan pada lahan pertanian, serta pengoptimalan komunikasi publik berbasis Early Warning System (EWS) guna menjaga ekspektasi pasar tetap kondusif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Memperkuat dan memperluas kesepakatan KAD secara formal dengan pemerintah daerah surplus guna menjamin kesinambungan pasokan pangan strategis (khususnya beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit) serta memangkas rantai pasok pangan yang terlalu panjang.

Optimalisasi Intervensi Pasar Menjelang HBKN: Mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), SPHP, dan program inovasi distribusi (seperti program *Jukung Pangan*) untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pokok menghadapi momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H dan musim haji.

Mitigasi Dampak El Nino dan Kemarau Dini: Melakukan langkah antisipatif terhadap risiko musim kemarau 2026 yang datang lebih awal melalui pemantauan intensif lahan pertanian rawan kekeringan, dukungan fasilitas pompanisasi dan embung, serta penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG.

Monitoring dan Early Warning System (EWS) Komunikasi Publik: Memperkuat sistem peringatan dini berbasis pemantauan harga harian komoditas bergejolak (*volatile food*) serta mengefektifkan komunikasi publik secara transparan guna mengelola ekspektasi pasar dan mencegah terjadinya *panic buying*.

Dukungan Kesiapan Menuju Kota Penghitung Inflasi 2028: Meningkatkan kualitas pelaporan data IPH serta mendukung penuh persiapan pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH) 2027 oleh BPS melalui fasilitasi data, validasi outlet/komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM statistik harga di daerah.

Akselerasi Digitalisasi Tata Kelola Keuangan (ETPD): Mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan penerapan SP2D Online di seluruh SKPD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran.

Penguatan Kelembagaan Pangan dan Pemberdayaan Petani: Mendorong peran BUMD pangan sebagai *oftaker* hasil pertanian lokal, menjalankan program aksi Roadmap TPID 2025-2027, serta memitigasi dampak kenaikan harga pakan ternak demi menjaga stabilitas produksi daging dan telur ayam ras lokal.